



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan

Nomor : 1311240000930 Masa Pajak - Tahun Pajak : 11 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 432389468416000 / 6371056212960005

2. NIK/NO.PASPOR : -

3. NITKU : 6371056212960005000000

4. NAMA : REBECCA NATALIA SUWIGNYO

5. ALAMAT : JL RATU ASIA BARU II BLOK C II NO 56A KOMP TAMAN RATU - KOTA ADM. JAKARTA BARAT

6. WAJIB PAJAK : ☐ YA

7. KODE NEGARA DOMISILI : -

LUAR NEGERI

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-09	2.820.513	1.410.256	☐	5	70.512

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : 025540428025000 / 0025540428025000

5. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NITKU : 0025540428025000000000

09/12/2024

3. NAMA : TRANCOSMOS INDONESIA

4. NAMA
PENANDATANGAN: ARDI ADITHYA


F1IYV0SU

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	
1. 21-100-03	Upah Pegawai Tidak Tetap
2. 21-100-04	Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
3. 21-100-05	Imbalan Kepada Agen Asuransi
4. 21-100-06	Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5. 21-100-07	Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6. 21-100-09	Bukan Pegawai Lainnya
7. 21-100-10	Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
8. 21-100-11	Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
9. 21-100-12	Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
10. 21-100-13	Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
11. 21-100-99	Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
PPh PASAL 26	
1. 27-100-99	Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26